

ABSTRAK

Rina Holisoh : Pelaksanaan Pasal 53 ayat 1 Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terlantar di Kota Bandung

Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Adapun perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam praktek sering terjadi anak diterlantarkan oleh orang tuanya karena faktor ekonomi. Masalah perlindungan anak bukan saja tanggung jawab orang tua tapi juga merupakan tanggung jawab pemerintah sebagaimana tercantum dalam Pasal 53 ayat 1 undang-undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan atau bantuan cuma-cuma khusus dari anak dari keluarga yang tidak mampu dan anak-anak terlantar dan pemerintah juga wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar baik dalam lembaga maupun di luar lembaga.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu memberikan gambaran tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaannya yang mengangkat masalah perlindungan anak terlantar kemudian menganalisisnya. Sedangkan jenis data yang dipergunakan adalah data kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pemerintah Kota Bandung dalam melaksanakan Pasal 53 ayat 1 Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang tanggung jawabnya dalam melindungi anak-anak terlantar menemukan beberapa kendala diantaranya yaitu masalah sumber daya manusia, kurangnya dana, kurangnya partisipasi masyarakat sehingga masalah perlindungan anak-anak terlantar di Kota Bandung kurang maksimal. Oleh sebab itu maka diperlukan upaya semua pihak untuk menegakkan hukum agar penerapan dari suatu peraturan dapat berfungsi dengan baik.